

Revitalisasi Tata Kelola menuju BUMDes Produktif pada BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara

*Governance Revitalization towards Productive BUMDes in
BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas in Southeast Maluku Regency*

Novalien Carolina Lewaherilla¹, Fransiska Natalia Ralahallo²,
Lilian Sonya Loppies³✉.

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

✉ liliansloppies@gmail.com

Article history:
Submitted: 28 Jul 2022
Approved: 10 Sep 2022
Published: 31 Oct 2022

Abstract; *The purpose of implementing this PKM activity is to provide understanding and knowledge about productive BUMDes management, due to the phenomenon that occurred in Tanjung Siput BUMDes Ohoi Lairngangas in Southeast Maluku Regency and to encourage the creation of competitive BUMDes governance in accordance with the nature of its presence, namely to improve the economic welfare of rural communities. Through the Participatory Action Research (PAR) method to the Management and Members of BUMDes, the process of sharing knowledge and skills is carried out, among others regarding the bookkeeping system and its application to BUMDes, Financial Management Implementation, strategies for handling non-performing loans through credit analysis training and strengthening organizational governance through organizational training. The conclusion of this PKM activity is that the understanding of BUMDes members in the field of production management and marketing can increase and there is a change in the mindset of BUMDES members to be more professional and able to run BUMDes.*

Keyword: BUMDes; Management; Revitalization

Abstrak; Tujuan dilaksanakannya kegiatan PKM ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes yang Produktif, akibat fenomena yang terjadi pada BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara serta mendorong terciptanya tata kelola BUMDes yang berdaya saing sesuai dengan hakikat kehadirannya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Melalui metode *Participatory Action Research* (PAR) kepada Pengurus dan Anggota BUMDes maka proses berbagi pengetahuan dan keterampilan dilakukan antara lain tentang sistem pembukuan dan aplikasinya pada BUMDes, penerapan manajemen keuangan, strategi penanganan kredit bermasalah melalui pelatihan analisa kredit dan penguatan tata kelola organisasi melalui pelatihan organisasi. Kesimpulan dari kegiatan PKM ini adalah pemahaman anggota BUMDes dalam bidang manajemen dan pemasaran produksi dapat meningkat dan terjadi perubahan *mindset* anggota BUMDES untuk lebih profesional dan mampu dalam menjalankan BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan; Revitalisasi

P-ISSN 2715-7997 E-ISSN 2716-0750 © 2022 The Author(s).

Published by LP2M INSURI Ponorogo. This is an open access article under the [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

doi: <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan Maluku telah menjadi isu sentral selama beberapa tahun belakangan ini. Priseptian Laga (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, dari segi ekonomi, angka kemiskinan Maluku didorong oleh pendapatan per kapita yang relatif rendah, biaya hidup yang tinggi, investasi yang rendah, dan pengangguran yang tinggi. Semua faktor tersebut secara langsung dan tidak langsung menjelaskan minimnya lapangan pekerjaan di Maluku.

Menurut Maryunani (2008) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang berada di desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan meningkatkan kebutuhan serta potensi desa. Artinya BUMDes merupakan lembaga usaha dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha guna memperoleh hasil berupa laba. Artinya BUMDes merupakan lembaga usaha dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha guna memperoleh hasil berupa laba. Selain itu, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang di dalam aktivitasnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan berpartisipasi juga dalam produksi pelayanan sosial. Pada saat yang sama, sebagai entitas komersial, ia bertujuan untuk memperoleh laba dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar. Tujuan pendirian BUMDes juga adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, serta memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan prosedur di tingkat desa, pemerintah menerbitkan Permendes tahun 2020 PDT dan Peraturan Transmigrasi Nomor 6 yang membuat pengecualian terhadap aturan penggunaan dana desa 2020. Dengan peraturan tersebut, dana desa tersebut dapat digunakan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pemerintah pun akan mengambil langkah serupa terkait dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi bagi yang terdampak Covid-19.

Selain itu, pemerintah telah memanfaatkan momentum Covid-19 untuk mempercepat terbentuknya BUMDes di setiap Desa yang saat ini belum merata. Jika BUMDes dapat dikelola secara baik, maka pada gilirannya bukan hanya dapat memandirikan Desa tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota masyarakat. Menyadari bahwa keberadaan BUMDes juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di Desa. Maka arah program yang selama ini dilakukan pemerintah yang bersifat pola pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) haruslah diubah. Dalam hal ini pemerintah melakukan program

pengembangan BUMDes terkadang tidak melihat yang dilakukan, apakah program itu benar-benar dibutuhkan masyarakat atau tidak, sehingga program yang ada tidak tepat pada sasaran dan tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri. Pada masa sekarang ini, paradigma sudah bergeser menjadi pola pendekatan yang bersifat *bottom-up* (dari bawah ke atas). Dimana partisipasi dari aktif masyarakat menjadi dasar utama pada program pengembangan BUMDes.

Untuk mencapai tujuan BUMDes, kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa. Artinya, ada mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama untuk memastikan inisiatif BUMDes tidak mendistorsi ekonomi pedesaan BUMDes (Ristantiya & Ardani, 2021). Ke depan, jika BUMDes dikelola dengan baik, tidak hanya akan menjadikan desa mandiri, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, keberadaan BUMDes dapat membuka lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di desa.

Penelitian oleh Afifa R. F. (2018) tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD tidak dimaksimalkan, sehingga gagal memberikan perbaikan yang signifikan. Elemen yang belum dimaksimalkan antara lain pangsa pasar, modal dan karyawan (tenaga kerja). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Filya (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Saran yang diberikan peneliti yaitu: (1) Dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap dimensi dan indikator yang belum terpenuhi, (2) Menarik minat masyarakat terhadap BUMDes dengan membuat acara dan (3) Pemerintah Desa melakukan pendampingan intensif terhadap BUMDes agar memacu pendapatan. Selanjutnya KOSO & MAMBO (2018) pengorganisasian harus berada diluar struktur organisasi pemerintah desa, sejak dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian, hanya memiliki tiga pengurus saja yang terdiri dari Ketua Badan Usaha Milik Desa, sekretaris dan bendahara, yang sudah tahu akan tugas dan fungsinya masing-masing tapi karena kurangnya pengurus sehingga mengakibatkan tidak efektifnya dalam menjalankan tugas.

Menurut Lilik Handajani et al. (2021) Evaluasi pengelolaan BUMDes memerlukan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menggunakan dokumen dan laporan yang mendukung tanggung jawab pengelolaan keuangan BUMDes. Masalah pengelolaan keuangan BUMDES sebagian besar terkait dengan struktur organisasi yang tidak jelas dan uraian tugas dan wewenang antara pengelola dan pengawas, kurangnya

sertifikat dan pelaporan keuangan yang mengevaluasi kegiatan pengelolaan BUMDES dan tanggung jawab pengelola. Dengan bantuan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes, dimungkinkan untuk merancang dokumen dan laporan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa/Ohoi (BUMDes) Tanjung Siput Desa/Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara provinsi Maluku telah terbentuk sejak tahun 2019. Jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes dapat diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut (KOSO & MAMBO, 2018):

1. *Serving*: BUMDes menjalankan "*bisnis sosial*" dimana BUMDes melakukan tugas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes hadir untuk memberikan *social benefits* kepada masyarakat, dan bukan untuk memperoleh *economic profit* yang besar.
2. *Banking*: BUMDes menjalankan "*bisnis uang*", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Desa dengan bunga yang rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat Desa dari para rentenir Desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu : Bank Desa atau lembaga perkreditan Desa atau lembaga keuangan mikro Desa.
3. *Renting*: BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa.
4. *Brokering*: BUMDes hadir untuk menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar supaya para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar.
5. *Trading*: BUMDes menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau menjual barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau memasarkan ke pasar yang lebih luas.
6. *Holding*: BUMDes sebagai "usaha patungan" atau induk dari unit-unit usaha desa, dimana BUMDes mengatur dan mensinergikan semua unit mandiri tersebut untuk menumbuhkan usaha bersama.

Fenomena umum yang terlihat banyak BUMDes mengalami permasalahan-permasalahan karena kurangnya pendidikan dan pendampingan, seperti: keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes, fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya inovasi dan teknologi digitalisasi yang digunakan, akses promosi dan pemasaran, dan terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha dan terjadi kredit macet karena ketidakmampuan pengelola BUMDes untuk mengatasi hal dimaksud (Filya, 2018).

Fakta seperti ini juga dialami oleh BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas, ditambah lagi dengan sejumlah faktor krusial seperti pengelolaan yang belum baik, pembukuan bersifat sederhana, kurangnya kompetensi SDM yang memadai, pembagian persentase bunga belum berdasarkan data dan analisis, bahkan anggota yang tidak membayar uang pinjaman tepat waktu. Selibuhnya juga adalah BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas belum melakukan inovasi antara lain memiliki teknologi pendukung untuk mempermudah pekerjaan simpan pinjam BUMDes Tanjung Siput. Upaya peningkatan dan pengelolaan BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah serta stakeholder lainnya. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar dengan SDM yang baik sudah pasti akan memberi nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang di kembangkan. Itu berarti akan memperkuat kelembagaan ekonomi desa (Rahayu & Febrina, 2021).

Kajian terkait BUMDes antara lain Nana M (2019) tentang “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan” menjelaskan implementasi meningkat dengan adanya pelatihan. BUMDes Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dimiliki oleh kurang lebih 28,37% peserta pelatihan. termasuk optimalisasi potensi desa. BUMDes yang sudah maju dan bertumbuh tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan tata kelola administratif, tetapi kemampuan mengelola bisnis, sebab keuntungan dari bisnis BUMDes sudah pasti merupakan peluang bagi kenaikan nilai PAD dan bersumber untuk desa dan dapat mendukung kesejahteraan ekonomi. BUMDes didirikan di Indonesia, namun keberadaannya tidak berkembang karena bisnis BUMDes kurang menguntungkan. BUMDes juga dipengaruhi oleh perkembangan beberapa model bisnis yang sudah mapan (Rahmi et al., 2020).

Oleh karena itu pilihan mengintervensi kegiatan PKM dengan kelompok sasaran BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara adalah cara tepat untuk mengatasi situasi kritis BUMDes tersebut dan mendorong terciptanya tata kelola BUMDes yang produktif dan berdaya saing sesuai dengan hakikat kehadirannya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ohoi.

METODE

Adapun Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program PKM ini adalah dengan metode pendampingan atau PAR (*Participatory Action Research*). Salviana et al. (2022) menjelaskan tentang metode PAR, dimana metode ini berfungsi sebagai pengamat dan pengembang model.

Karakteristik praktik yang lebih menyeluruh digunakan untuk PAR. PAR adalah proses di mana komunitas, dalam hal ini BUMDes, mencoba mempelajari suatu masalah secara ilmiah untuk membimbing, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Pendekatan ini memungkinkan seluruh elemen BUMDes untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif dalam pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan secara maksimal, dimana permasalahan pengelolaan BUMDes diperjelas dan dicari solusi bersama selama pelaksanaan solusi disamping proses transfer informasi. Adapun Pendampingan pada BUMDes ini bertujuan untuk membantu anggota BUMDes mengelola aset-aset dan permodalan serta mengelola usaha yang dimiliki supaya mendapatkan keuntungan. Dan pada gilirannya dengan keuntungan yang dimiliki dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan pendampingan di BUMDes dibagi menjadi 2 tahap yang dilaksanakan selama 4 pekan, dimulai dari tahap persiapan selama 2 pekan dan tahap pelaksanaan selama 2 pekan. Tahap persiapan merupakan tahap yang bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi BUMDes saat ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut kemudian dibentuk kelompok kerja dan bertanggung jawab atas kegiatan dan capaian yang ingin dicapai. Pada tahap persiapan ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya Tahap kedua yakni Tahap Pelaksanaan. Adapun Tahap Pelaksanaan dimulai dengan: 1) Pembuatan Tata Kelola Organisasi, Keuangan dan Kredit, 2) Sosialisasi dan Pembelajaran BUMDes dengan Masyarakat Ohoi, 3) Pendidikan dan Pelatihan, 4) Pendampingan selama 4 minggu terhadap BUMDes. Kemudian tahap yang terakhir dilakukan adalah Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM di BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara, dilakukan dimulai dari FGD tentang Teknis Pelaksanaan Pengabdian dengan Mitra. Tahap ini dilakukan untuk mendiskusikan kegiatan pengabdian sebelum dilaksanakan, yang diawali dengan pemaparan gambaran kegiatan PkM yang akan dilaksanakan Untuk Tahap yang kedua yakni pelaksanaan terdiri dari serangkaian proses identifikasi kebutuhan BUMDes, sosialisasi, pelatihan dan penyusunan instrumen tata kelola organisasi, keuangan, dan kredit. Selanjutnya dilakukan pembuatan instrumen tata kelola organisasi, keuangan, dan kredit. Pembuatan instrumen tata kelola keuangan bertujuan untuk menata pengelolaan keuangan BUMDes. Instrumen tata kelola keuangan dimulai dengan penyusunan anggaran, penataan pembukuan (penjurnalan uang masuk dan keluar), sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan

juga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Hal yang cukup penting juga adalah Pembuatan instrumen kredit bertujuan untuk meningkatkan pinjaman beredar dan mengatasi masalah kredit macet yang dihadapi BUMDes. Melalui instrumen ini pihak BUMDes dapat merumuskan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman, mengetahui cara analisa kredit dengan menggunakan alat analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), cara memutuskan kredit dengan memperhitungkan risiko dari suatu pinjaman dan merumuskan strategi untuk menangani pinjaman yang sudah macet. Selanjutnya dilakukan Penyusunan instrumen perencanaan bisnis yang menggunakan alat analisa SWOT dan instrumen kelayakan usaha. Hasil ini mendukung pengabdian yang dilakukan oleh (Ayu Irma Fakhrieh, 2020) bahwa masih belum efektif penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dalam pemberian kredit di PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura karena masih ada kelemahan dalam analisis pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C tersebut.

Selanjutnya Tahap yang paling penting adalah Sosialisasi dan Pembelajaran BUMDes kepada masyarakat Ohoi. Tahap ini yakni sosialisasi dan pembelajaran BUMDes kepada masyarakat agar masyarakat memahami apa itu BUMDes, tujuan dan pentingnya BUMDes bagi masyarakat Ohoi. Pada tahap sosialisasi dan pembelajaran diharapkan pengelola BUMDes dan masyarakat Ohoi memiliki pemahaman tentang BUMDes sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Tahap selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Mitra terkait dengan a) Sistem pembukuan dan aplikasinya pada BUMDes. b) Penerapan Manajemen Keuangan. c) Strategi penanganan kredit bermasalah melalui pelatihan analisa kredit. d) Penguatan tata kelola organisasi melalui pelatihan organisasi. Dalam Pelatihan ini, perangkat BUMDes diberikan materi berupa penyusunan AD/ART, penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi dari penerapan kebijakan dan program BUMDes. e) Pelatihan *business plan* bertujuan agar mitra mampu menyusun perencanaan bisnis yang baik dan terukur sehingga dapat menghasilkan keuntungan, memilih potensi usaha dan menilai kelayakan usaha yang akan dikembangkan.

Sebelum pelatihan diberikan angket pre-test, setelah itu dibagikan materi pelatihan dan diakhiri dengan post-test, dimana diketahui seberapa besar peningkatan pengetahuan mitra. Fase terpenting dari PKM ini adalah fase pendampingan, yang berlangsung selama 2 minggu. Tujuan dari tahap pendampingan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengurus BUMDes. Untuk membantu hal tersebut, tim PKM menawarkan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat digunakan di BUMDes. Aplikasi ini relatif sederhana, sehingga memudahkan kasir BUMDes untuk menggunakannya. Selain itu, Tim PKM juga menawarkan bantuan praktis

untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dengan bantuan ini diharapkan Bendahara BUMDes dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola keuangan BUMDes, selain itu pengurus BUMDes berkesempatan untuk bekerja dengan tabel-tabel yang diberikan dalam waktu 2 minggu. Administrator BUMDE memberikan kebebasan berkomunikasi sehubungan dengan spreadsheet ini. Ketika waktu yang dicadangkan berakhir, pada minggu ke-4 tim PKM mengevaluasi hasil kerja para pengelola BUMDes. Dalam proses evaluasi ini, tim PKM dibagi menjadi 3 kelompok. Pengelola BUMDes menunjukkan hasil pekerjaannya di setiap kelompok kerja yang ditugaskan. Tim PKM mengoreksi kegiatan para pengawas di BUMDes.

Dalam kegiatan pendampingan ini, terlihat bahwa pengelola BUMDes memahami tujuan dan fungsi dari LKS yang diberikan. Selain itu, masih terdapat permasalahan atau kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Kasir BUMDes masih kesulitan untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan ini karena kasir belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk itulah kegiatan pendampingan ini terus dievaluasi dan dipantau secara intensif. Pada saat yang sama, kelompok lain diminta untuk mengamati realisasi kertas kerja yang dibuat selama proses pendampingan. Setelah kegiatan selesai, tim PKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Untuk mendukung operasional pengelolaan BUMDes untuk produktivitas yang maksimal, tim PKM menyediakan 1 perangkat printer all-in-one (print, scan dan copy) dan program aplikasi keuangan BUMDes. Dalam monitoring dan evaluasi ini, tim PKM juga melihat hasil yang dicapai, yakni perbaikan proses pengelolaan BUMDes seperti bantuan penyusunan SOP, pembukuan keuangan dengan bantuan permohonan, dan job description di BUMDes. Widiastuti et al. (2019) menunjukkan bahwa (1) sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, (2) tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas.

Evaluasi menemukan bahwa masih terdapat kelemahan yaitu kecepatan penggunaan aplikasi dan beberapa job description yang tidak layak yaitu para manajer unit. Pada fase ini diberikan penilaian terhadap semua kegiatan yang dilakukan tim. dan mitra melaksanakan kegiatan PkM. Selain itu, kendala di lapangan juga dinilai pada tahap evaluasi. Berdasarkan ini, tindakan atau reaksi selanjutnya dibuat dengan mengoptimalkan dan memotivasi pengelola BUMDes dan perbaikan sarana dan prasarana BUMDes. Selain itu, pengelola BUMDes harus berkembang lebih jauh dalam tahap evaluasi, mengingat banyak sumber daya alam dan aset desa yang belum sepenuhnya dioptimalkan dan dimanfaatkan.



Gambar 1. Tim PKM sedang memberikan Pelatihan dan Pendampingan



Gambar 2. Peserta PKM sedang berdiskusi dengan Tim PKM

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan PkM untuk merevitalisasi pengelolaan BUMDes melalui Bantuan Tata Usaha BUMDes di Desa Tanjung Siput/Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan dengan sangat baik. Metode PAR dilaksanakan setelah dilakukan analisis kebutuhan yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan bantuan ini. Berdasarkan pengamatan proses pendampingan, terjadi perubahan manajemen dan administrasi yang lebih tertib, sistem akuntansi berpindah dari sistem akuntansi tradisional, SDM BUMDes mulai menunjukkan kompetensi dan keterampilan dalam mengelola BUMDes, pembagian persentase berdasarkan data dan analisis, anggota membayar uang pinjaman tepat waktu dan kredit macet menurun, dan inovasi seperti teknologi pendukung digunakan untuk memfasilitasi koperasi simpan pinjam BUMDes Tanjung Siput/Ohoi Lairngangas. Selain itu, dapat disimpulkan dari hasil

evaluasi akhir bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMDes, pengelola BUMDes harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah desa. Kerjasama yang baik antara pimpinan BUMDes dengan pemerintah desa semakin membuka peluang pemberdayaan pimpinan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

REFERENSI

- Afifa R. F. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*”, *Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri*. 5(1), 36–37.
- Ayu Irma Fakhri. (2020). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT MACET PADA PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk, CABANG MARTAPURA*. 16(3), 385–402.
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- KOSO, J., & MAMBO, M. O. R. (2018). (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa) JELI KOSO MARTHA OGOTAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51), 12.
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmp.4i4.1127>
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia.
- Nana M, D. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Politeknik Negeri Lampung*.
- Priseptian, Laga, W. P. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Rahmi, V. A., Ismanto, H. I., & Fathoni, M. Z. (2020). Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi Covid’19. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2), 90. <https://doi.org/10.30587/jre.v3i2.1730>

- Ristantiya, S., & Ardani, Y. (2021). *Siva Ristantiya , Yakob Ardani , Tri Hartanto 3 1 2*. 32–40.
- Salviana, V., Fuadiputra, I. R., Bustami, M. R., & Jha, G. K. (2022). Participatory Action Research (PAR) Model for Developing A Tourism Village in Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5(2), 193–207.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>